

ABSTRAK

MUJAHIDAH RAPI, *Peran humas dalam implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di badan publik (suatu studi pada kantor wilayah kementerian agama provinsi sulawesi selatan)* (dibimbimbing oleh H. A. Muin Fahmal, Dan Ahmad Fadil)

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran Humas dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode dalam penelitian ini dengan pendekatan empiris (penelitian terhadap pelaksanaan, pengawasan, serta actor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan setelah selesainya pengumpulan data). Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Sifat penelitian adalah deskriptif, dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini data yang di peroleh dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu: Data primer, dan Data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Secara keseluruhan peran Humas Kakwil Kemenag Provinsi Sul-sel dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, telah berlangsung dengan baik dan Sangat Optimal. Salah satu dasar dari ke berhasilan dalam pelaksanaan tersebut adalah dengan PTSP, secara jelas dan terurai sudah dijabarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi. (2) faktor penghambat dalam implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008, lebih disebabkan oleh kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia (SDM).

Adapun rekomendasi dalam tulisan ini ialah Perlunya pemberian sosialisasi kepada semua pihak menyangkut berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Juga Harus dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini perlu kiranya menunjuk petugas khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi ini agar bisa lebih focus.

ABSTRACT

MUJAHIDAH RAPI, *The role of public relations in implementing law number 14 of 2008 concerning public information disclosure in public bodies (reversed by the office of the Ministry of Religion, South Sulawesi Province)* (guided by H. A Muin Fahmal and Ahmad Fadil.)

This study aims to: (1) To find out and analyze the Role of Public Relations in the Implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness at the Regional Office of the Ministry of Religion of South Sulawesi Province. (2) To find out and analyze the factors that influence the role of Public Relations in Public Information Openness at the Regional Office of the Ministry of Religion of South Sulawesi Province.

The method in this study is an empirical approach (research on implementation, supervision, and the factors that hinder the implementation, analysis carried out after completion). This research was conducted in the Regional Office of the Ministry of Religion of South Sulawesi Province. The nature of the research is descriptive, in collecting data and information needed in this study the data obtained can be classified into two types, namely: Primary data, and secondary data. Data analysis in this study used qualitative analysis.

The results of this study indicate that; (1) All locations of the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi in the Implementation of Law Number 14 of 2008 have been implemented well and are very optimal. One of the foundations of the work is PTSP, clearly and unraveled the tasks and functions of each part of information and service. (2) inhibiting factors in the implementation of Law Number 14 of 2008, which are mostly caused by a lack of resources, costs / funds and human resources (HR).

What needs to be done in this paper is the need to provide socialization for all parties regarding the enactment of Law Number 14 of 2008 concerning KIP. Also, it should be done to increase the capacity, insight, skills of the workers who provide trust in the provision and service of public information, so that fast, appropriate, and efficient services can be carried out, including in this case it is necessary. and this information service in order to be more focused.